



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/2/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020 perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 15 Maret 2021 Nomor 170/488/401.040/2021 perihal Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Kota Madiun;
 2. Surat Walikota Madiun tanggal 15 Maret 2021 Nomor 130/763/401.011/2021 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020;
 3. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 15 Maret 2021 Nomor 170/474/401.040/2021 perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2020;
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020;
 5. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 002/F.PDIP/III/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2020;
 6. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 002/F.Demokrat/III/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2020;
 7. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 003/F.Perindo/III/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2020;

8. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 02/FPKB-03/II/III/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2020;
9. Surat Ketua Fraksi MANTAB DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 03/F.MANTAB/III/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2020;
10. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 02/F.Gerindra/III/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2020;
11. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 04/F.PKS-PAN/III/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Walikota Madiun Tahun 2020;
12. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020 dan merumuskan hasil pembahasan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Walikota Madiun.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 17 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/ 2 /2021
TANGGAL : 17 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2020**

1. Ketua : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, SH, M.Hum
2. Wakil Ketua : H. NUR SALIM, S.PdI
3. Anggota : Drs. SUGENG, SH, MH
4. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG SUBROTO, SH, SE, MM
5. Anggota : SUDARJONO, ST
6. Anggota : IHSAN ABDURRAHMAN SIDDIQ
7. Anggota : SLAMET HARIYADI
8. Anggota : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi, M.Pd
9. Anggota : F. BAGUS PANUNTUN
10. Anggota : DEDI TRI ARIFianto, SE
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.